

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II BALAI KALIBRASI TAHUN 2025

KATA PENGANTAR



Tahun 2025 adalah awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Balai Kalibrasi Tahun 2025 – 2029. Laporan Kinerja Interim Triwulan Balai kalibrasi ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2025 Triwulan II, dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Balai Kalibrasi Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang diturunkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan dan diuraikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Kepala Balai kalibrasi Tahun 2025.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 menyajikan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja Balai Kalibrasi. Dokumen ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Capaian tersebut dapat dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis Balai Kalibrasi tahun 2025 dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja sehingga target kinerja Balai Kalibrasi akhir tahun dapat tercapai.

Jakarta, 19 Juli 2025

Kepala Balai Kalibrasi



Henry Handoyo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Kalibrasi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis Triwulan II pada Tahun 2025 mengacu pada Renstra Balai Kalibrasi Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang dievaluasi, hanya 1 (satu) sasaran strategis yang bisa dievaluasi karena realisasi indikator dari 2 (dua) sasaran strategis lainnya belum tersedia atau baru dapat diperoleh sesuai penilaian di akhir tahun. Dari sasaran strategis yang dievaluasi, diperoleh bahwa hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi Triwulan II sebesar 100%.
2. Capaian Indikator Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar sebesar 75,63%.
3. Belum ada capaian indikator Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi, hasil akan diperoleh pada Triwulan IV namun Balai Kalibrasi tetap melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Kegiatan Forum Konsultasi Publik 2025 dan telah menindaklanjuti saran dan masukan pelanggan pada Forum Konsultasi Publik 2024.
4. Belum ada capaian indikator Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi, hasil akan diperoleh pada Triwulan IV namun Balai Kalibrasi tetap melakukan monev setiap triwulannya.
5. Belum ada capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi, hasil akan diperoleh pada Triwulan IV.
6. Belum ada capaian indikator Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi Balai Kalibrasi, hasil akan diperoleh pada Triwulan IV.

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2025 untuk mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja serta membiayai kegiatan lainnya Balai Kalibrasi memperoleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 5.064.043.000,00 (Lima milyar enam puluh empat juta empat puluh tiga ribu rupiah). Pada awal Triwulan I terdapat efisiensi anggaran DIPA menjadi Rp 2.697.159.000,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan II, dari 6 (enam) indikator kinerja Balai Kalibrasi, ada 2 (dua) indikator kinerja yang pengukurannya per triwulan dan 4 (empat) indikator kinerja memiliki target di akhir tahun, sehingga belum bisa dilakukan perhitungan pada Triwulan II, meskipun demikian berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai target di akhir tahun. Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, Balai Kalibrasi harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin/berkala untuk segera mengetahui kendala/permasalahan yang timbul agar segera dilakukan upaya perbaikan/tindak lanjut untuk mencapai target kinerja.
2. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai Kalibrasi Triwulan II tahun 2025, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja Balai

Kalibrasi antara lain:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja berbasis digital, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja.
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Kegiatan secara mendalam, terutama untuk Indikator Kinerja yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Balai Kalibrasi periode 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4 ISU STRATEGIS	4
BAB II	6
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA	6
2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)	10
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)	11
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	12
2.5 METODE PENGUKURAN	15
BAB III	16
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.3 REALISASI ANGGARAN	30
3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA	33
3.5 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	33
BAB IV	34
4.1 KESIMPULAN	34
4.2 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	34
Lampiran	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Balai Kalibrasi	2
Gambar 1. 2. Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
Gambar 1. 3. Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Jenis Kelamin	3
Gambar 1. 4. Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Jabatan	4
Gambar 3. 1. Rumus % Capaian	16

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Tabel Kategori Tingkat Maturitas Manajemen Risiko	9
Tabel 2. 2.	Rencana Kerja Tahunan 2025	11
Tabel 2. 3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
Tabel 2. 4.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
Tabel 2. 5.	Metode Pengukuran	15
Tabel 3. 1.	Kategori Capaian Indikator Kinerja	16
Tabel 3. 2.	Predikat NKO	17
Tabel 3. 3.	Perhitungan NKO Balai Kalibrasi Triwulan II	17
Tabel 3. 4.	Kategori pencapaian indicator kinerja	19
Tabel 3. 5.	Perhitungan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan II	19
Tabel 3. 6.	Realisasi kinerja Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target triwulan yang bersangkutan	21
Tabel 3. 7.	Perhitungan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi Triwulan II	21
Tabel 3. 8.	Realisasi kinerja Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi	22
Tabel 3. 9.	Realisasi kinerja Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar Triwulan II dengan target triwulan yang bersangkutan	23
Tabel 3. 10.	Realisasi kinerja Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar Triwulan II dengan target tahunannya	24
Tabel 3. 11.	Pelaksanaan Kalibrasi di Balai Besar POM/ Balai POM/ Loka POM	25
Tabel 3. 12.	Realisasi kinerja Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target triwulan yang bersangkutan	27
Tabel 3. 13.	Realisasi kinerja Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target tahunannya	27
Tabel 3. 14.	Realisasi kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target triwulan yang bersangkutan	27
Tabel 3. 15.	Realisasi kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target tahunannya	28
Tabel 3. 16.	Realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target triwulan yang bersangkutan	29
Tabel 3. 17.	Realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target tahunannya	29
Tabel 3. 18.	Realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target triwulan yang bersangkutan	30
Tabel 3. 19.	Realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target tahunannya	30

Tabel 3. 20. Tabel realisasi dan capaian (%) anggaran Balai Kalibrasi Triwulan II	31
Tabel 3. 21. Perhitungan Tingkat Efisiensi Triwulan II	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung-jawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan *stakeholders*.

Balai Kalibrasi sebagai salah satu unit kerja di BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran setiap triwulan dan setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Balai Kalibrasi merujuk kepada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Balai Kalibrasi tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Kepala Balai Kalibrasi tahun 2025.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

BPOM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan kembali dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Berdasarkan peraturan tersebut, Balai Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

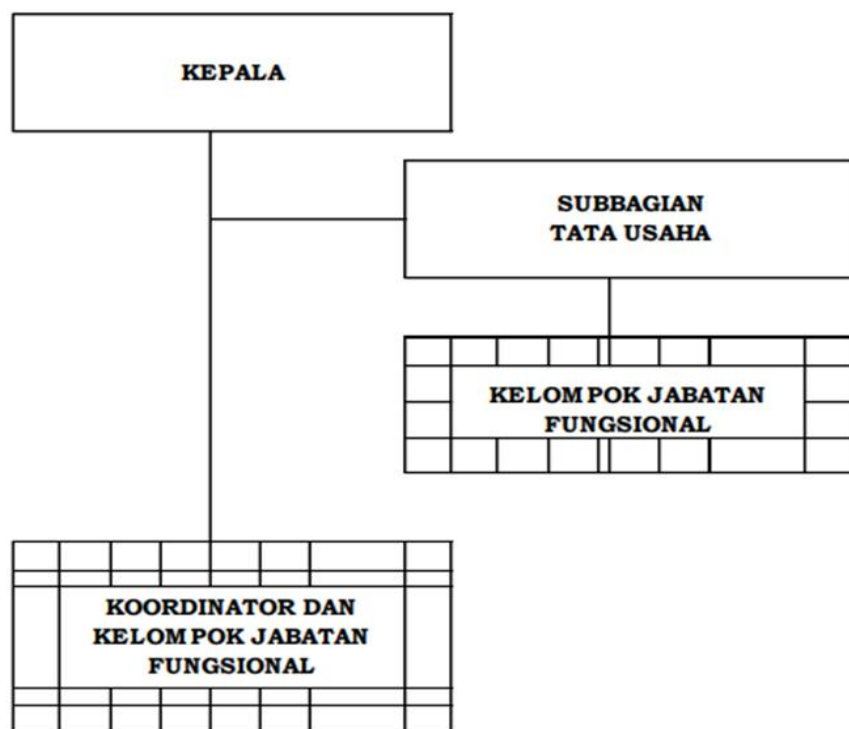
2. pelaksanaan penjaminan ketertelusuran kebenaran nilai ukur terhadap pemenuhan standar acuan kalibrasi;
3. pelaksanaan layanan teknis kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan;
4. pelaksanaan pengembangan metode kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan penyusunan standar kebutuhan peralatan laboratorium dan sarana prasarana pengujian Obat dan Makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Kalibrasi telah diatur dalam Lampiran III Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Balai Kalibrasi dipimpin oleh Kepala Balai dengan dibantu Kepala sub bagian tata usaha dan para pejabat fungsional sesuai masing-masing penugasannya.

Susunan organisasi Balai Kalibrasi terdiri atas: Kepala; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Organisasi Balai Kalibrasi digambarkan seperti bagan berikut:

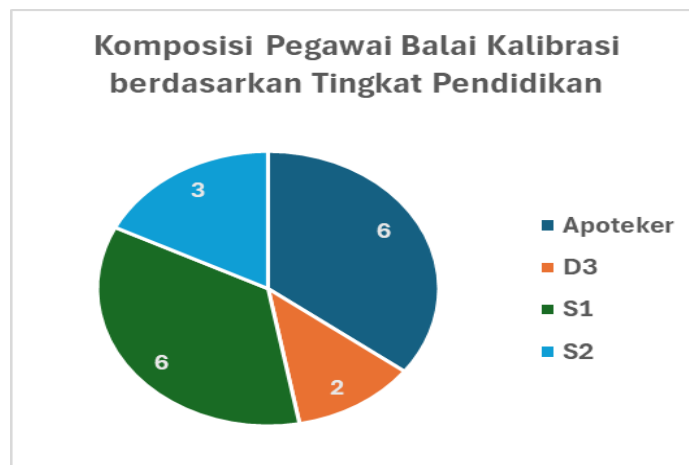


Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Balai Kalibrasi

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan administrasi penjaminan mutu.

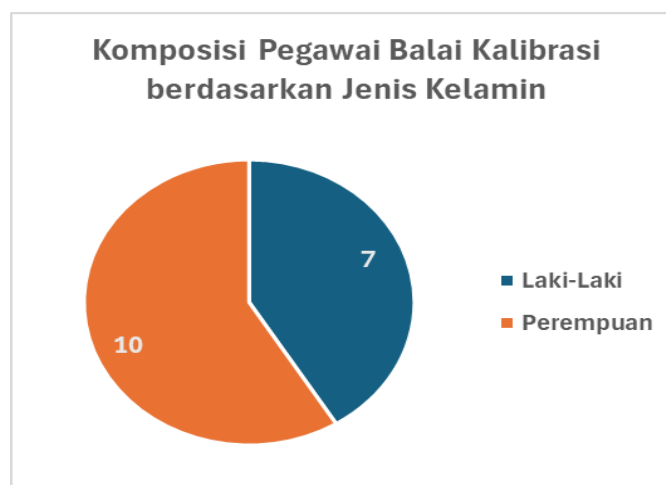
1.3.2 1.1.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset penting yang berpengaruh terhadap kinerja Balai Kalibrasi. Sebagai Satker baru, Balai Kalibrasi saat ini didukung oleh 17 pegawai yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan latar belakang pendidikan Magister sebanyak 3 (tiga) orang, Apoteker sebanyak 6 (enam) orang, Sarjana sebanyak 5 (lima) orang dan Diploma sebanyak 2 (dua) orang.



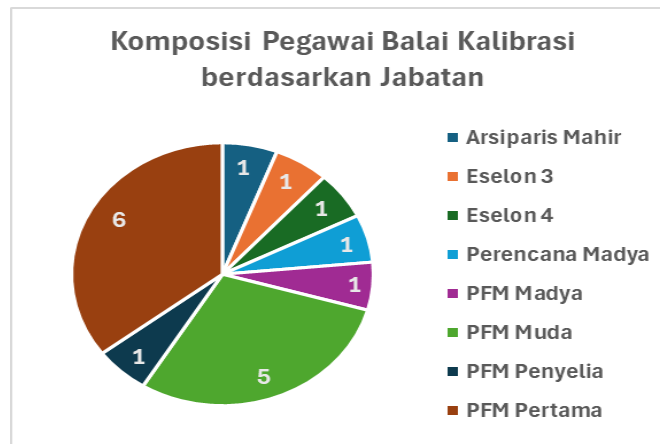
Gambar 1. 2. Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Tingkat Pendidikan

Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Balai Kalibrasi yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7 (tujuh) pegawai dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 (sepuluh) pegawai.



Gambar 1. 3. Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kelompok jabatan, pegawai Balai Kalibrasi terdiri atas 1 (satu) pegawai Eselon 3, 1 (satu) pegawai Eselon 4, 1 (satu) pegawai Perencana Ahli Madya, 1 (satu) pegawai PFM Ahli Madya, 5 (lima) pegawai PFM Ahli Muda, 6 (enam) pegawai PFM Ahli Pertama, 1 (satu) pegawai PFM Penyelia, dan 1 (satu) pegawai Arsiparis Mahir.



Gambar 1. 4. Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Jabatan

1.4 ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai Kalibrasi perlu dilakukan analisis yang menyeluruh terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran strategis, baik isu internal maupun eksternal. Isu internal antara lain:

1. Sumber Daya Manusia Balai Kalibrasi

Saat ini, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Balai Kalibrasi adalah sebanyak 17 (tujuh belas) pegawai. Ditinjau dari analisis beban kerja, utamanya dalam upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja, Balai Kalibrasi masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 45 pegawai. Fokus pengelolaan SDM di Balai Kalibrasi adalah untuk mengembangkan pegawai Balai Kalibrasi yang semakin kompeten dan handal untuk semakin meningkatkan kinerja. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan SDM di Balai Kalibrasi diantaranya adalah melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, *on job training*, bimbingan teknis, maupun seminar-seminar berkaitan dengan kalibrasi.

2. Ruang Lingkup Kalibrasi

Perkembangan dunia kalibrasi yang dinamis menuntut Balai Kalibrasi untuk memastikan kehandalan, akurasi hasil, jaminan kualitas yang merujuk pada *good laboratory practice*, dan memperkaya ruang lingkup kalibrasi yang terakreditasi ISO 17025:2017 guna menjawab tantangan perkembangan peralatan laboratorium.

3. Sarana prasarana

Sejalan dengan tantangan dan kebutuhan untuk penambahan ruang lingkup, maka dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium berupa ruangan laboratorium untuk masing-masing ruang lingkup, peralatan termasuk standar kalibrasi dan alat penunjang.

4. Balai Kalibrasi sebagai Center of Excellence & Collaboration of Measurements

Balai Kalibrasi sebagai pusat rujukan terkait ketertelusuran kebenaran nilai ukur terutama untuk peralatan laboratorium dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, *laboratory reference* dalam uji banding antar laboratorium kalibrasi, dan sistem pengukuran peralatan laboratorium BPOM.

Isu eksternal Balai Kalibrasi antara lain:

1. Kepuasan Pelanggan Balai Kalibrasi

Balai Kalibrasi merupakan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik berupa layanan kalibrasi kepada pelanggan baik internal maupun eksternal BPOM. Sebagai

penyelenggara fungsi pelayanan publik, indikator utama yang dinilai adalah sejauh mana kepuasan dan pengelolaan keluhan pelanggan.

2. Pemanfaatan Peralatan Laboratorium Hasil Rekomendasi

Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium berupa pengadaan peralatan laboratorium diawali dengan tahap perencanaan melalui permohonan rekomendasi perencanaan peralatan laboratorium untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi pengadaan peralatan laboratorium.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Visi, misi BPOM, tujuan, serta sasaran kegiatan Balai Kalibrasi sebagaimana tertuang di Rancangan Renstra Balai Kalibrasi adalah sebagai berikut:

Visi BPOM: “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman, Bermutu dan Berdaya Saing dalam Mendukung Masyarakat Sehat bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi BPOM:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan \ publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Untuk “Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan, melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” Balai Kalibrasi mendukung melalui kegiatan kalibrasi alat ukur yang digunakan dalam pengujian mutu dan keamanan produk, validasi peralatan laboratorium, serta penyediaan data ukur yang tertelusur dan andal guna menjamin akurasi hasil pengawasan.”

Dalam rangka mewujudkan “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya guna memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”, Balai Kalibrasi mendukung melalui penyelenggaraan layanan kalibrasi yang akurat, transparan, dan sesuai standar; penerapan sistem manajemen mutu laboratorium; serta peningkatan kompetensi SDM kalibrasi untuk memastikan keandalan alat ukur yang digunakan dalam proses pengawasan dan pengujian.”

Tujuan Balai Kalibrasi 2025-2029

Tujuan BPOM 2025-2029:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Tujuan Balai Kalibrasi 2025-2029 sesuai dengan tujuan BPOM untuk Point 1 dan 5

Sasaran Kegiatan Balai Kalibrasi 2025-2029:

Dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, Balai Kalibrasi menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, dan target sebagaimana disajikan dalam tabel sasaran strategis berikut ini:

Sasaran Kegiatan ke-1: Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Pengawasan terhadap keamanan Obat dan Makanan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Mengingat pentingnya pengujian di laboratorium, maka dicantumkan dalam salah satu sasaran kinerja BPOM yaitu menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan kemampuan uji laboratorium agar hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium di BPOM berkualitas dan valid. Secara umum penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan peralatan laboratorium dan verifikasi metode analisis yang telah dilakukan di Balai / Balai Besar POM yang digunakan untuk pengujian dan bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup pengujian.

Peralatan yang digunakan dalam pengujian sediaan farmasi dan makanan merupakan peralatan yang telah ditetapkan sesuai standar peralatan pada SKL sesuai tingkatan laboratoriumnya, peralatan tersebut juga harus dalam kondisi baik dan *ready use* dan memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan, untuk itu peralatan yang digunakan harus dikalibrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar dengan target sebesar 100% pada tahun 2029.

Sasaran Kegiatan ke-2: Layanan Publik Balai Kalibrasi yang Prima

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Balai Kalibrasi mendukung pelayanan publik BPOM dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Balai Kalibrasi.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator IPP Balai Kalibrasi dengan target sebesar 4,70 di tahun 2029.

Sasaran Kegiatan ke-3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Balai Kalibrasi yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2025–2029, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi

Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Kalibrasi akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Kalibrasi. Pada tahun 2025-2029, Balai Kalibrasi berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian Zona Integritas, Nilai Kinerja Anggaran, Indeks Manajemen Risiko, dan Nilai SAKIP.

Sumber daya yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas, baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Kalibrasi untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran strategis dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini diukur dengan indikator Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi :

1. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
2. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

diharapkan Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi dengan target sebesar 76, di tahun 2029.

Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi

1. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas

perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

3. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a. Revisi DIPA (bobot 10%)
- b. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
- c. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
- d. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
- e. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
- f. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
- g. Capaian Output (bobot 25%)
- h. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

4. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

- a. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
- b. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Balai kalibrasi membuat Target nilai Kinerja anggaran tahun 2029 sebesar 4.

Manajemen Risiko (ISO31000:2018), aktivitas-aktivitas terkoordinasi, yang dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi terkait dengan risiko yang dihadapinya.

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
2. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
3. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 2. 1. Tabel Kategori Tingkat Maturitas Manajemen Risiko

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangkapenilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
	terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Balai Kalibrasi dengan target Indeks Manajemen Risiko sebesar 2,2 di tahun 2029.

Nilai AKIP Balai Kalibrasi

1. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
4. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Nilai AKIP Balai Kalibrasi dengan target sebesar 80 di tahun 2029.

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. RKT disusun mengacu pada Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra/Revisi Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan perubahan

pada tahun berjalan. RKT disusun dan disahkan setelah rancangan Rencana Kerja Pemerintah di tahun n+1 terbit. RKT Satuan Kerja, Unit Kerja dan UPT disahkan setelah tanggal pengesahan RKT BPOM. Khusus RKT tahun pertama pelaksanaan Renstra (yang disusun pada tahun terakhir pelaksanaan Renstra periode sebelumnya) disusun mengacu pada Rancangan Renstra.

Rencana kerja tahunan Balai Kalibrasi tahun 2025 berdasar *cascading log frame* dokumen RKT yang telah disahkan tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Rencana Kerja Tahunan 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100
Layanan publik Balai Kalibrasi yang prima	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	4,51
Terwujudnya Tata Kelola Balai Kalibrasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75,25
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	90
	Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	3,2

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Balai Kalibrasi Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Balai Kalibrasi, melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan. Berdasarkan hasil desk dengan unit pengampu, terdapat beberapa penyesuaian pada RKT antara lain penambahan indikator yaitu “Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) balai kalibrasi” dan perubahan target indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Balai Kalibrasi Tahun 2025 telah ditetapkan pada 12 Februari 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100
	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) balai kalibrasi	89,37

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Layanan publik Balai Kalibrasi yang prima	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	4,40
Terwujudnya Tata Kelola Balai Kalibrasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75,0
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4
	Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2,0

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) per bulan sampai dengan Desember 2025. Capaian RAPK dilaporkan setiap triwulan melalui aplikasi SIMETRIS menu *e-performance*. Capaian RAPK dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Sesuai DIPA awal RAPK Balai Kalibrasi adalah sebagai berikut

Tabel 2. 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	ANGGARAN
1	02 - Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	01 - Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi			88.07	88.07	89.37	89.37	89.37	89.37	89.37	89.37	89.37	89.37	988,872,000
		06 - Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar			30	30	50	50	50	50	80	80	80	100	1,901,932,000
2	06 - Layanan Publik Balai Kalibrasi yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi yang prima												4,4	100,000,000
3	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	09 - Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi												75	745,859,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	ANGGARAN
		11 - Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi												4	1,283,760,000
		12 - Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi												2,0	43,620,000
Total															5,064,043,000

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja seluruh indikator kinerja Balai Kalibrasi mengacu pada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sesuai Keputusan Kepala BPOM No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di BPOM.

Pengukuran pencapaian masing-masing Indikator Kinerja di Balai Kalibrasi dilakukan sebagai berikut :

Tabel 2. 5. Metode Pengukuran

NO	INDIKATOR KINERJA	METODE PENGUKURAN
1	Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	Realisasi dihitung berdasarkan jumlah alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi di tahun berjalan dibagi target tahun berjalan dikali 100%
2	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) balai kalibrasi	Realisasi dihitung berdasar rata-rata nilai SKL Balai Kalibrasi, dengan pembobotan untuk masing – masing komponen sebesar (Standar Ruang Lingkup = 75%; Standar Kompetensi Laboratorium = 15 % dan Standar Peralatan = 10 %)
3	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	Realisasi diperoleh dari hasil survei terhadap enam aspek layanan publik PPPOMN: Kebijakan Pelayanan (30%) Profesionalitas SDM (18%) Sarana Prasarana (15%) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%) Konsultasi dan Pengaduan (15%) Inovasi (7%)
4	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	Realisasi diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Utama terhadap implementasi RB di Balai Kalibrasi dalam pembangunan ZI menuju WBK
5	Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	Realisasi diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)
6	Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	Realisasi diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Utama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan yang telah dijalankan Balai Kalibrasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Balai kalibrasi sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Strategi BPOM yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan dari kewajiban Balai Kalibrasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan sesuai Keputusan Kepala BPOM No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di BPOM serta Surat Edaran Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Pengukuran indikator kinerja Balai Kalibrasi dilakukan dengan cara menghitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Gambar 3. 1. Rumus % Capaian

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Kategori Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	> 110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x < 100%	
Cukup	60% ≤ x < 90%	

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Kurang	< 60%	

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 3. 2. Predikat NKO

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	> 110%	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

Tabel 3. 3. Perhitungan NKO Balai Kalibrasi Triwulan II

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) balai kalibrasi	89,37	89,37	100	100
		Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	50	37,81	75,63	37,81 tidak menjadi perhitungan
2	Layanan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK
	publik Balai Kalibrasi yang prima	pelayanan publik Balai Kalibrasi				
3	Terwujudnya Tata Kelola Balai Kalibrasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	N/A	N/A	N/A	N/A
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Capaian PK						100
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)						100
Predikat NKO						Baik

Berdasarkan tabel di atas, Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK) pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 100 dengan predikat Baik.

capaian indikator Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar Balai Kalibrasi telah bersurat kepada Bapak Sestama terkait capaian tersebut sehingga untuk dapat dikecualikan dari perhitungan NKO nya, untuk selanjutnya berupaya untuk selalu meningkatkan komitmen dan meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya.

3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, misi, dan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang objektif dan transparan.

Tujuan Analisis Akuntabilitas Kinerja :

1. Menilai pencapaian tujuan organisasi.
2. Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
3. Meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.
4. Memberikan dasar untuk pengambilan keputusan berbasis kinerja.

Laporan Kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan

kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra).

Capaian kinerja hasil perbandingan dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 3. 4. Kategori pencapaian indicator kinerja

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$	
Akan tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% \leq x < 100\%$	
Perlu upaya keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$	

Tabel 3. 5. Perhitungan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan II

Sasaran Kegiatan / Indikator	Target 2025	Target Triwulan II	Satuan	Realisasi	Capaian terhadap Target Triwulan II	Capaian terhadap target tahunan	Kategori
Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)							
1 Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi	89,37	89,37	nilai	89,37	100	100,00 	Tercapai/melampaui

Sasaran Kegiatan / Indikator		Target 2025	Target Triwulan II	Satuan	Realisasi	Capaian terhadap Target Triwulan II	Capaian terhadap target tahunan	Kategori
2	Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100	50	Persen	37,81	75,63	37,81 	Perlu upaya keras
Sasaran Kegiatan 2. Layanan publik Balai Kalibrasi yang prima								
3	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	4,40	-	indeks	-	Akhir tahun	Akhir tahun	-
Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Tata Kelola Balai Kalibrasi yang Optimal								
4	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75,0	-	nilai	-	Akhir tahun	Akhir tahun	-
5	Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4	-	nilai	-	Akhir tahun	Akhir tahun	-
6	Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2	-	indeks	-	Akhir tahun	Akhir tahun	-

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 6 (enam) IKU, terdapat 1 (satu) IKU memperoleh kategori “tercapai/melampaui”. 1 (satu) IKU dan 1 IKU yang memperoleh kategori “perlu upaya keras” tetapi jika dibandingkan dengan target Triwulan II masih dalam kategori “baik”. Hal tersebut dikarenakan target pada Triwulan II sebesar 30%. Untuk 4 (empat) IKU lainnya belum dapat dinilai karena capaian dihitung pada akhir tahun.

SK 1. Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)

IKSK 1. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi

1. Standar Ruang Lingkup Balai Kalibrasi adalah acuan yang digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium dalam melakukan kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian obat dan makanan secara kimia dan biologi yang menggambarkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium.
2. Standar Kompetensi Laboratorium merupakan kemampuan laboratorium dalam melakukan kalibrasi sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten.
3. Peralatan laboratorium kalibrasi adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan kalibrasi alat ukur yang dapat berupa standar acuan kalibrasi, media kalibrasi, maupun alat pendukung dalam proses kalibrasi. Peralatan laboratorium kalibrasi yang memadai merupakan salah satu bagian yang dipertimbangkan dalam proses akreditasi laboratorium kalibrasi.

Perhitungan nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai Kalibrasi adalah

$$\frac{\sum \text{persen pemenuhan masing – masing alat}}{\sum \text{jenis alat pada standar peralatan kalibrasi}}$$

Dimana persen pemenuhan masing-masing alat adalah

$$\frac{\text{jumlah existing masing – masing alat}}{\text{jumlah standar masing – masing alat}} \times 100\%$$

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan

Tabel 3. 6. Realisasi kinerja Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) balai kalibrasi KL	89,,37	89,37	100,0	sangat baik 

Capaian realisasi indikator kinerja “Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi” triwulan 1 tahun 2025 dengan kategori sangat baik. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3. 7. Perhitungan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi Triwulan II

No	Komponen	Nilai SKL Triwulan II	Pembobotan	Realisasi Triwulan II
1	Ruang lingkup	90,22	75%	67,66
2	Standar Kompetensi Laboratirium	90,22	15%	13,53
3	Standar Peralatan	81,77	10%	8,18
Hasil Akhir				89,37

Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan komponen yang ada melalui tools monitoring dan evaluasi SKL Balai Kalibrasi. Capaian indikator ini sebesar $89,37/89,37 \times 100\% = 100\%$.

b. Perbandingan Realisasi target Triwulan terhadap target tahunan

Tabel 3. 8. Realisasi kinerja Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi	89,37	89,37	100	sangat baik 

c. Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Balai Kalibrasi terus berupaya mempertahankan nilai, melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dalam pemenuhan indikator kinerja “Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi” antara lain melalui:

1. Mempertahankan ruang lingkup kalibrasi yang sudah terakreditasi
2. Mempertahankan dan berupaya dalam peningkatan kompetensi laboratorium dalam rangka persiapan pemenuhan target ruang lingkup sesuai dengan Renstra Balai Kalibrasi tahun 2025-2029
3. Mempertahankan dan mengupayakan peningkatan standar peralatan melalui pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Pada TW II Balai Kalibrasi berusaha mempertahankan nilai SKL sesuai dengan eksisting Ruang Lingkup Kalibrasi yang dimiliki baik dari segi kompetensi personil sampai dengan peralatan yang dibutuhkan untuk memenuhi layanan kalibrasi peralatan laboratorium BPOM maupun peralatan dari pihak eksternal BPOM.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi rencana tindak lanjut

No	Rencana Tindak lanjut	Selesai	Tindak lanjut		
			Rencana aksi	Belum	Time line
1	pemenuhan standar SKL (refresmentalat) standar peralatan	-	pengadaan modul GP-10 dan refreshment standar pengukur suhu dan tekanan		TW III

IKSK 2. Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar

Alat laboratorium pengujian obat dan makanan adalah alat ukur dan alat penunjang yang digunakan untuk pengujian obat dan makanan di laboratorium Badan POM, sedangkan yang dimaksud dengan kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan, dalam kondisi tertentu, antara nilai suatu besaran yang ditunjukkan oleh peralatan ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang direpresentasikan oleh bahan ukur atau bahan acuan, dengan nilai terkait yang direalisasikan oleh standar.

Standar yang dimaksud disini adalah sesuai dengan Standar ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Tujuan dari kalibrasi alat laboratorium pengujian adalah untuk menjamin ketertelusuran kebenaran nilai ukur/pengukuran ke sistem satuan internasional yang berlaku dan dengan kalibrasi ini dapat pula diketahui seberapa jauh penyimpangan antara nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur dengan nilai standar ukur sehingga akurasi alat ukur diketahui dan terjamin. Ruang lingkup kalibrasi alat ukur pengujian obat dan makanan yang dimiliki oleh Balai Kalibrasi meliputi:

1. Gaya massa;
2. Volumetrik;
3. Suhu;
4. Instrumen analitik;
5. Tekanan dan laju putar/frekuensi

Pada tahun 2025 Balai Kalibrasi menargetkan persentase alat laboratorium pengujian obat dan makanan yang dikalibrasi sebesar 100% dengan jumlah alat sebanyak 3028. Untuk target persentase alat laboratorium pengujian obat dan makanan yang dikalibrasi di Triwulan II

sebesar 50 % atau setara dengan 1514 alat. realisasi alat yang terkalibrasi sampai dengan TW II sebanyak 1145 alat dengan capaian sebesar 75,63%.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan

Tabel 3. 9. Realisasi kinerja Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar Triwulan II dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	50%	37,81%	75,63 %	Cukup 

Capaian realisasi indikator kinerja “Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar” Triwulan II tahun 2025 termasuk cukup, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\% \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah alat yang dikalibrasi}}{\text{Target yang direncanakan}} \times 100\% \\ &= \frac{1145}{3028} \times 100\% \\ &= 37,81\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{37,81\%}{50\%} \times 100\% \\ &= 75,63\%\end{aligned}$$

b. Perbandingan Realisasi target Triwulan terhadap target tahunan

Tabel 3. 10. Realisasi kinerja Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar Triwulan II dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100%	37,81	37,81	Kurang 

Jika dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian realisasi indikator kinerja Triwulan II tahun 2025 “Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar” sebesar 37,81 %, karena target tahunan merupakan target akumulasi.

$$\begin{aligned}\% \text{Capaian IKK} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\ &= \frac{37,81\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 37,81\%\end{aligned}$$

c. Analisis penyebab kegagalan dan rencana tindak lanjut

Realisasi target Triwulan II tidak tercapai baik dibandingkan dengan target triwulan maupun target tahunan. Hal ini disebabkan oleh adanya implementasi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Di samping implementasi Instruksi Presiden tersebut, sampai saat laporan ini dibuat, belum terdapat kebijakan terkait revisi target.

Sebagai tindak lanjut, Balai Kalibrasi telah melaporkan kepada Sekretaris Utama melalui Nota Balai Kalibrasi telah melaporkan kepada Sekretaris Utama melalui Nota Dinas ke Sestama tanggal 7 Juli 2025 No PR.09.01.12.07.25.63 hal Usulan Pemanfaatan Anggaran UPT BPOM untuk pelaksanaan pada Balai Kalibrasi berkomitmen dalam meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran melalui pemenuhan capaian target sesuai dengan yang perencanaan. dengan usulan yaitu :

- Terkait capaian indikator TW 2, mohon dapat dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi Simetris menu e-performance.
- Anggaran pelaksanaan kalibrasi yang sudah dialokasikan oleh UPT pada tahun 2025 untuk dapat direalokasikan ke dalam DIPA Balai Kalibrasi
- Dapat dilakukan pembukaan blokir atas DIPA Balai Kalibrasi Tahun 2025 untuk Rincian Output BIA 001, Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi

Tabel 3. 11. Pelaksanaan Kalibrasi di Balai Besar POM/ Balai POM/ Loka POM

A Bulan	B Nama Laboratorium / UPT	C Anggaran	
		Pusat	Balai
01. Januari	DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	3	
	JAKARTA	99	
	JAMBI	64	
	PPFOMN - BALAI KALIBRASI	41	
	PPFOMN - BBP	17	
	PPFOMN - BPKOM	37	
	PPFOMN - KOBONAPFZA	27	
	PPFOMN - LAB BIOHAZARD	10	
	PPFOMN - MEM	37	
	PPFOMN - OTOKSKK	14	
	PPFOMN - PANGAN & AIR	12	
	PPFOMN - PRODUK BIOLOGI	51	
01. Januari Total		412	
02. Februari	BOGOR	16	
	DUMAI	2	
	JAKARTA	20	
	PALANGKARAYA	114	
	PALU	80	
	PANGKALPINANG	7	
	PEKANBARU	72	
	PPFOMN - KOBONAPFZA	5	
02. Februari Total		316	
03. Maret	BANJARMASIN	18	45
	DUMAI	2	
	MATARAM	23	48
	PPFOMN - BALAI KALIBRASI	1	
	PPFOMN - KOSMETIK	8	
	TARAKAN	44	
03. Maret Total		96	93
04. April	BANDA ACEH		64
	BANJARMASIN	10	
	DENPASAR		68
	DUMAI	2	
	JAMBI	20	
	MATARAM	13	
	PALU	20	
	PPFOMN - PANGAN & AIR	4	
04. April Total		88	132
05. Mei	BANDA ACEH	7	
	BANDAR LAMPUNG	16	41
	BANJARMASIN	7	
	MAKASSAR	18	76
	MATARAM	5	
	PPFOMN - OTOKSKK	5	
	PPFOMN - PANGAN & AIR	8	
	SERANG		89
	YOGYAKARTA	6	
	SAMARINDA	1	
05. Mei Total		73	206
06. Juni	AMBOEN	16	69
	BANDA ACEH	27	
	BANDAR LAMPUNG	14	
	BATAM	8	
	PPFOMN - BALAI KALIBRASI	53	
	PPFOMN - OTOKSKK	2	
	PPFOMN - PRODUK BIOLOGI	16	
	YOGYAKARTA	23	85
	BAUBAU		3
	BANYUMAS	1	
06. Juni Total		160	157
Grand Total		1145	588
Jumlah Kereluruhan		1733	

d. Analisis kegiatan yang keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator kinerja selama Triwulan II

Mengacu pada kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran/hasil yang diharapkan, maka output yang dapat diklaim realisasinya oleh Balai Kalibrasi adalah kalibrasi alat yang menggunakan anggaran Balai Kalibrasi. Hal ini yang menyebabkan capaian indikator tidak mencapai target yang ditetapkan.

kegagalan pencapaian target indikator ini karena ada nya efisiensi anggaran 70% dan belum adanya Surat edaran untuk perubahan target tahunan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tindak lanjut rekomendasi terhadap hasil evaluasi indikator kinerja “Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar” yaitu pengajuan usulan penyesuaian target alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar ke Biro perencanaan dan keuangan.

No	Rencana Tindak lanjut	Selesai	Tindak lanjut		
			Rencana aksi	Belum	Time line
1	Pengajuan usulan penyesuaian target alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar ke Biro perencanaan dan keuangan	-			TW II

Sasaran Kegiatan 2. Layanan publik Balai Kalibrasi yang prima
IKSK 3. Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB No 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Target Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai kalibrasi pada tahun ini adalah 4,40.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan

Tabel 3. 12. Realisasi kinerja Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	Tidak ada target TW II (target tahunan)	-	-	-

b. Perbandingan Realisasi target Triwulan terhadap target tahunan

Tabel 3. 13. Realisasi kinerja Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	4,40	-	-	-

Realisasi indikator kinerja “Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi” Triwulan II tahun 2025 belum ada penilaian dari Biro Hukum dan Organisasi BPOM.

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Tata Kelola Balai Kalibrasi yang Optimal IKSK 4. Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan

Tabel 3. 14. Realisasi kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	Tidak ada target TW II (target tahunan)	-	-	-

b. Perbandingan Realisasi target Triwulan terhadap target tahunan

Tabel 3. 15. Realisasi kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75,0	-	-	-

Capaian indikator kinerja “Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi” tahun 2025 belum ada penilaian dari Inspektorat dan akan dilakukan di akhir tahun.

c. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja selama Triwulan II

Penilaian capaian dan realisasi indikator kinerja “Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi” dilakukan pada akhir tahun. Namun Balai Kalibrasi melakukan upaya untuk memastikan capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target akhir tahun melalui kegiatan Monitoring dan evaluasi LKE ZI Balai Kalibrasi setiap triwulan untuk memonitor perolehan nilai pembangunan ZI dan kelengkapan data dukungannya.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya sesuai dengan POA yang telah direncanakan.

IKSK 5. Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi

Nilai kinerja anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Penilaian IKPA tahun anggaran 2024 terdiri dari 8 indikator, meliputi : Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Penilaian EKA dihitung dari 4 variabel yaitu Capaian RO, Capaian Sasaran Program, Capaian Sasaran Strategis, Penggunaan SBK (Standar Biaya Keluaran).

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan

Perhitungan indikator nilai kinerja anggaran PPPOMN berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut: $NKA = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$.

Tabel 3. 16. Realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	Tidak ada target TW II (target tahunan)	-	-	-

b. Perbandingan Realisasi target Triwulan terhadap target tahunan

Tabel 3. 17. Realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4	-	-	-

Penilaian realisasi dan capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi” di akhir tahun.

c. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja selama Triwulan II

Penilaian capaian dan realisasi indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi” dilakukan pada akhir tahun. Namun Balai Kalibrasi melakukan upaya untuk memastikan capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target akhir tahun melalui kegiatan berikut:

1. Revisi DIPA yang terukur dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
2. Penyelesaian tagihan yang dilaksanakan tepat waktu maksimal 17 Hari Kerja
3. Pengelolaan UP/TUP dilakukan secara tepat waktu dan akurat
4. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara rutin agar capaian output dilaporkan tepat waktu dan akurat
5. Surat Perintah Membayar disampaikan tepat waktu sehingga tidak adanya Dispensasi Surat Perintah Membayar

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya sesuai dengan POA yang telah direncanakan meliputi:

1. Deviasi Halaman III DIPA yaitu memperbaiki Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA dengan menyesuaikan/revisi RPD disesuaikan dengan realisasi perbulannya dan RPD bulan berikutnya dibuat sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana pencairan anggaran yang akan dilakukan.
2. Realisasi anggaran lebih dipertimbangkan terkait target penyerapan anggaran setiap triwulannya

IKSK 6. Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi

ISO 31000:2018 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan penerapan SPIP dan **standar penerapan manajemen risiko, serta penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BPOM.**

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan

Tabel 3. 18. Realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	Tidak ada target TW II (target tahunan)	-	-	-

b. Perbandingan Realisasi target Triwulan terhadap target tahunan

Tabel 3. 19. Realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi Triwulan II dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2	-	-	-

Capaian dan realisasi indikator kinerja “Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi” akan di nilai di akhir tahun oleh Inspektorat tahun 2025.

c. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja selama Triwulan II

Penilaian capaian dan realisasi indikator kinerja “Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi” dilakukan pada akhir tahun. Namun Balai Kalibrasi melakukan upaya untuk memastikan capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target akhir tahun melalui kegiatan berikut: Monitoring dan evaluasi LKE Manajemen Risiko (SPIP) Balai Kalibrasi setiap triwulan untuk memonitor perolehan indeks manajemen risiko dan kelengkapan data dukungnya.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya sesuai dengan POA yang telah direncanakan.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Tabel 3. 20. Tabel realisasi dan capaian (%) anggaran Balai Kalibrasi Triwulan II

KODE/NAMA JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)	
		SP2D	SP2D + OUTSTANDING KONTRAK	SP2D	SP2D + OUTSTANDING KONTRAK
Belanja Pegawai	1.283.760,000	739.346.379	739.346.379	57.59%	57.59%
Belanja Barang	3.168.618.000	506,045,735	665.645.735	15.97%	21.07%
Belanja Modal	698.142.000	71,228,700	71,228,700	10.20%	10.20%
Total Pagu (Tanpa Efisiensi)	5.150.520.000	1.316.620.814	1.476.220.814	25.56%	28.66%
Pagu Efisiensi	2.697.159.000	1.316.620.814	1.476.220.814	48.82%	54.73%

Tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran Balai Kalibrasi sampai dengan triwulan II TA 2025 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.316.620.814,00 dan persen capaian 54,73% dari total anggaran sebesar Rp 2.697.159.000,00

Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur

dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tabel 3. 21. Perhitungan Tingkat Efisiensi Triwulan II

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Output			Input				IE	SE	TE	Capaian
			Target	Realisasi	% capaian indikator (output)	Target Awal	Target Efisiensi	Realisasi	% capaian anggaran (input)				
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi	89,37	89,37	100,00	988.872.000	399.374.000			5,42	1	4,42	Tidak efisien
3		Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	50	37,81	75,63	1.901.932.000	488.906.000			2,96	1	1,96	Tidak efisien
2	Layanan publik Balai Kalibrasi yang prima	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	4,4		akhir tahun	100.000.000	6.218.000	3.045.000	48,97	akhir tahun	1	akhir tahun	akhir tahun
3	Terwujudnya Tata Kelola Balai Kalibrasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75		akhir tahun	770.859.000	509.756.000	344.524.067	67,59	akhir tahun	1	akhir tahun	akhir tahun
4		Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4		akhir tahun	1.283.760.000	1.283.760.000	365.540.063	28,47	akhir tahun	1	akhir tahun	akhir tahun
5		Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2		akhir tahun	18.620.000	9.145.000	0	0,00	akhir tahun	1	akhir tahun	akhir tahun

3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tahun 2025 merupakan tahun pertama Balai Kalibrasi menyusun laporan kinerja.

3.5 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Laporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Pemanfaatan data kinerja dalam organisasi atau instansi pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Laporan kinerja Balai Kalibrasi sangat bermanfaat bagi Balai Kalibrasi untuk meningkatkan kinerja, melalui antara lain:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja,
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja,
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja,
4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Balai Kalibrasi Triwulan II Tahun 2025 antara lain:

1. Dari 6 (dua puluh) indikator kinerja Balai Kalibrasi yang diukur, 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori baik (capaian $100\% < x \leq 110\%$), dan 1 indikator dengan capaian cukup (capaian $70\% \leq x < 90\%$). Indikator Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi dengan capaian 75,63 telah disetujui Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM untuk tidak masuk dalam perhitungan NKO.
2. Nilai Pencapaian Sasaran Organisasi (NKO) Balai kalibrasi tahun 2025 adalah 100,00% dengan predikat kinerja “Baik”.
3. Anggaran Balai Kalibrasi dari hasil efisiensi tahun 2025 sebesar Rp 2.697.159.000 dengan realisasi sampai akhir bulan Juni sebesar Rp 1,224,103,303 atau sebesar 54,73 % dari pagu yang dikelola Balai Kalibrasi (sesuai pada aplikasi Sakti per 30 Juni 2025).

4.2 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

1. Balai Kalibrasi mengoptimalkan pagu efisiensi TA 2025 dengan berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kalibrasi peralatan untuk menjamin kebenaran alat ukur dan sistem pengukuran yang digunakan untuk mendapatkan hasil pengujian laboratorium yang valid
2. Balai Kalibrasi telah melaporkan kepada Sekretaris Utama melalui Nota Dinas ke Sestama tanggal 7 Juli 2025 no PR.09.01.12.07.25.63 hal Usulan Pemanfaatan Anggaran UPT BPOM untuk pelaksanaan pada Balai Kalibrasi berkomitmen dalam meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran melalui pemenuhan capaian target sesuai dengan yang perencanaan. dengan usulan yaitu :
 - a. Terkait capaian indikator TW 2, mohon dapat dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi Simetris menu e-performance.
 - b. Anggaran pelaksanaan kalibrasi yang sudah dialokasikan oleh UPT pada tahun 2025 untuk dapat direalokasikan ke dalam DIPA Balai Kalibrasi
 - c. Dapat dilakukan pembukaan blokir atas DIPA Balai Kalibrasi Tahun 2025 untuk Rincian Output BIA 001, Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi

Lampiran

1. RKT
2. PK
3. RAPK
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satker
5. Nota Dinas hal Pengelolaan anggaran dan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Kalibrasi

KEPALA BALAI KALIBRASI
KEPUTUSAN KEPALA BALAI KALIBRASI
NOMOR HK.02.02.12.09.24.04 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI KALIBRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI KALIBRASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Kalibrasi pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Kalibrasi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kalibrasi tentang Rencana Kinerja Balai Kalibrasi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan

Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KALIBRASI TENTANG RENCANA KINERJA BALAI KALIBRASI TAHUN 2025
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Kalibrasi Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Kalibrasi dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2024

KEPALA BALAI KALIBRASI,



HENRY HANDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI KALIBRASI
NOMOR HK.02.02.12.09.24.04 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI KALIBRASI

RENCANA KINERJA BALAI KALIBRASI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100%
2	Layanan publik Balai Kalibrasi yang prima	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	4,51
3	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75,25
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	90
		Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	3,2

KEPALA BALAI KALIBRASI,

HENRY HANDOYO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KALIBRASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENRY HANDOYO

Jabatan : Kepala Balai Kalibrasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUSAN GRACIA ARPAN

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai
Kalibrasi



HENRY HANDOYO

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
Nasional



SUSAN GRACIA ARPAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KALIBRASI**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	02 - Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	01 - Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi	89.37 Nilai
		06 - Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100 Persen
2.	06 - Layanan Publik Balai Kalibrasi yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi yang prima	4.4 Indeks
3.	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	09 - Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75 Nilai
		11 - Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4 Nilai
		12 - Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 5,064,043,000 (Lima Miliar Enam Puluh Empat Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	50,000,000
2.	DR.4133 - Pengujian Obat dan Makanan	2,990,804,000
3.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,023,239,000

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai
Kalibrasi


HENRY HANDOYO

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
Nasional


SUSAN GRACIA ARPAN



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KALIBRASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	02 - Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	01 - Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi			88.07	88.07	88.07	89.37	89.37	89.37	89.37	89.37	89.37	89.37	988,872,000
		NO	RO				KOMPONEN		SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar				051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium		B - Pelatihan Dalam Negeri Balai Kalibrasi			45,120,000		45,120,000	
		2.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar				051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium		G - Perencanaan Pemenuhan Peralatan Laboratorium BPOM			253,060,000		253,060,000	
		3.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar				051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium		C - Pelatihan Internal Balai Kalibrasi			22,550,000		22,550,000	
		4.	DR.4133.CAB.001 - Sarana Pengujian Obat dan Makanan				053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium			668,142,000		668,142,000	
		06 - Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar			30	30	30	50	50	50	80	80	80	100	1,901,932,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar			051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium			H - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Alat Laboratorium BPOM				65,310,000		65,310,000
		2.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar			051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium			D - Penerapan Sistem Mutu Balai Kalibrasi				83,155,000		83,155,000
		3.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar			051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium			E - Pemeliharaan Alat Laboratorium				150,000,000		150,000,000
		4.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar			051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium			F - Pelatihan Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Laboratorium				52,719,000		52,719,000
		5.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar			051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium			I - Pelaksanaan Kalibrasi Alat Laboratorium BPOM				1,417,268,000		1,417,268,000
		6.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar			051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium			A - Rekalibrasi Alat Standar/Peralatan Laboratorium				133,480,000		133,480,000
2.	06 - Layanan Publik Balai Kalibrasi yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi yang prima												4.4	100,000,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.4133.BAH.004 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan			051 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan			B - Publikasi Pelayanan Publik				10,000,000		10,000,000
		2.	DR.4133.BAH.004 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan			051 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan			C - Inovasi Pelayanan Publik				23,236,000		23,236,000
		3.	DR.4133.BAH.004 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan			051 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan			A - Forum Komunikasi Publik Balai Kalibrasi				66,764,000		66,764,000
3.	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	09 - Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi												75	745,859,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			A - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai Kalibrasi				50,000,000		25,000,000
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran			002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			C - Administrasi Kegiatan Perkantoran				720,859,000		720,859,000
		11 - Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi												4	1,283,760,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																																																			
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																																																				
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="8">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran</td><td>001 - Gaji dan Tunjangan</td><td colspan="8">A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan UPT Balai Kalibrasi</td><td>1,283,760,000</td><td>1,283,760,000</td></tr></table>															NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan UPT Balai Kalibrasi								1,283,760,000	1,283,760,000																								
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																				
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan UPT Balai Kalibrasi								1,283,760,000	1,283,760,000																																																				
		12 - Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi													2	43,620,000																																																		
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="5">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran</td><td>002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor</td><td colspan="5">A - Perawatan Sarana</td><td>6,620,000</td><td>6,620,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan</td><td>051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan</td><td colspan="5">A - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai Kalibrasi</td><td>50,000,000</td><td>25,000,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran</td><td>002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor</td><td colspan="5">B - Perawatan Peralatan Kantor</td><td>5,000,000</td><td>5,000,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN</td><td>054 - Penatausahaan BMN</td><td colspan="5">A - Pengelolaan Barang Milik Negara</td><td>7,000,000</td><td>7,000,000</td></tr></table>															NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Perawatan Sarana					6,620,000	6,620,000	2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai Kalibrasi					50,000,000	25,000,000	3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Perawatan Peralatan Kantor					5,000,000	5,000,000	4.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - Pengelolaan Barang Milik Negara					7,000,000	7,000,000
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																							
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Perawatan Sarana					6,620,000	6,620,000																																																							
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai Kalibrasi					50,000,000	25,000,000																																																							
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Perawatan Peralatan Kantor					5,000,000	5,000,000																																																							
		4.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - Pengelolaan Barang Milik Negara					7,000,000	7,000,000																																																							
												Total	5,064,043,000																																																					

Jakarta, 12 Febuary 2025

Kepala Balai Kalibrasi


HENRY HANDOYO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
ESELON I : 01 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 691155 **BALAI KALIBRASI**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/07/25 4:10 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 16/7/25 2:23 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	879,827,000	879,827,000	461,847,200	0	461,847,200	52.49	417,979,800
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	65,000	65,000	7,188	632	6,556	10.09	58,444
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	57,395,000	57,395,000	33,345,210	0	33,345,210	58.1	24,049,790
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	9,971,000	9,971,000	5,729,650	0	5,729,650	57.46	4,241,350
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	24,661,000	24,661,000	12,600,000	0	12,600,000	51.09	12,061,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	123,981,000	123,981,000	63,350,000	0	63,350,000	51.1	60,631,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,236,000	10,881,000	9,370,860	0	9,370,860	86.12	1,510,140
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	36,725,000	36,725,000	20,132,760	0	20,132,760	54.82	16,592,240
511129	Belanja Uang Makan PNS	130,764,000	126,000,000	46,791,000	0	46,791,000	37.14	79,209,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,535,000	10,000	0	0	0	0	10,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,268,160,000	1,269,516,000	653,173,868	632	653,173,236	51.45	616,342,764
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	15,600,000	14,244,000	508,000	0	508,000	3.57	13,736,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	15,600,000	14,244,000	508,000	0	508,000	3.57	13,736,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,283,760,000	1,283,760,000	653,681,868	632	653,681,236	50.92	630,078,764
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	113,787,000	230,864,000	68,722,171	0	68,722,171	29.77	162,141,829
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	82,080,000	82,080,000	18,996,625	0	18,996,625	23.14	63,083,375
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	68,640,000	68,640,000	26,640,000	0	26,640,000	38.81	42,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	274,507,000	391,584,000	114,358,796	0	114,358,796	29.2	277,225,204
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	178,371,000	196,011,000	15,921,000	0	15,921,000	8.12	180,090,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	57,000,000	57,720,000	12,000,000	0	12,000,000	20.79	45,720,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	235,371,000	253,731,000	27,921,000	0	27,921,000	11	225,810,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	151,695,000	148,335,000	0	0	0	0	148,335,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	151,695,000	148,335,000	0	0	0	0	148,335,000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	34,400,000	34,400,000	0	0	0	0	34,400,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	429,200,000	383,600,000	170,500,000	0	170,500,000	44.45	213,100,000

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
ESELON I : 01 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 691155 **BALAI KALIBRASI**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/07/25 4:10 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 16/7/25 2:23 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	463,600,000	418,000,000	170,500,000	0	170,500,000	40.79	247,500,000
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	161,620,000	161,620,000	23,898,300	0	23,898,300	14.79	137,721,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	161,620,000	161,620,000	23,898,300	0	23,898,300	14.79	137,721,700
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,595,498,000	1,559,398,000	152,164,639	0	152,164,639	9.76	1,407,233,361
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,500,000	45,600,000	10,350,000	0	10,350,000	22.7	35,250,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	190,350,000	190,350,000	0	0	0	0	190,350,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,795,348,000	1,795,348,000	162,514,639	0	162,514,639	9.05	1,632,833,361
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,082,141,000	3,168,618,000	499,192,735	0	499,192,735	15.75	2,669,425,265
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	698,142,000	606,913,000	0	0	0	0	606,913,000
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	71,229,000	71,228,700	0	71,228,700	100	300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	698,142,000	678,142,000	71,228,700	0	71,228,700	10.5	606,913,300
5361	Belanja Modal Lainnya							
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	698,142,000	698,142,000	71,228,700	0	71,228,700	10.2	626,913,300
	JUMLAH BELANJA	5,064,043,000	5,150,520,000	1,224,103,303	632	1,224,102,671	23.77	3,926,417,329

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI KALIBRASI**

NOTA DINAS

NOMOR: PR.09.01.12.07.25.63

Yth. : Sekretaris Utama
Dari : Kepala Balai Kalibrasi
Lampiran : -
Hal : Pengelolaan anggaran dan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Kalibrasi
Tanggal : 7 Juli 2025

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode kerja Triwulan 2 tahun 2025 dan dalam rangka proses penyusunan Laporan Kinerja Interim serta Laporan Evaluasi Internal TW 2, dengan ini kami laporkan hal berikut:

1. Berdasar pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran DIPA POK Balai Kalibrasi pada RO 4133.BIA.001 Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar, I. Pelaksanaan Kalibrasi Alat Laboratorium BPOM yang semula sebesar Rp. 1.417.268.000 diblokir Rp. 1.170.596.000 (82,6%) menjadi Rp. 246.672.000 (17,4%).
2. Mengacu pada Persyaratan Standard ISO 17025:2017 klausul 6.4 Peralatan; butir 6.4.6 bahwa peralatan pengukuran harus dikalibrasi jika nilai akurasi atau ketidakpastian pengukurannya berpengaruh pada keabsahan hasil yang dilaporkan. Berdasarkan hal tersebut, Balai Kalibrasi melakukan koordinasi dengan UPT Balai Besar/Balai POM, agar masing-masing dapat mengalokasikan anggaran pelaksanaan kegiatan kalibrasi.
3. Berdasarkan sisa anggaran yang tersedia (Rp. 246.672.000), pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium BPOM hanya dapat mengakomodir sebanyak 6 UPT Balai Besar/Balai POM dari 36 UPT yang sudah direncanakan dan jadwal pelaksanaan sudah tersusun pada akhir tahun 2024.
4. Sampai dengan bulan Juni 2025, Balai Kalibrasi telah melaksanakan kalibrasi in-situ ke 17 UPT Balai Besar/Balai POM. Pembiayaan menggunakan anggaran Balai Kalibrasi sebanyak 4 UPT, pembiayaan melalui sharing anggaran sebanyak 3 UPT, dan pembiayaan melalui penganggaran oleh UPT sebanyak 10 UPT.
5. Sesuai jadwal kalibrasi yang telah disusun dan sudah disampaikan kepada UPT Balai Besar/Balai POM hingga bulan November 2025, terdapat 20 UPT Balai Besar/Balai POM yang belum dilaksanakan kalibrasi in-situ.

6. Terkait pemanfaatan anggaran UPT Balai Besar/Balai POM untuk pelaksanaan pada RO alat Laboratorium yang Dikalibrasi Sesuai Standar, kami telah meminta arahan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, terkait mekanisme pelaporan realisasi indikator Balai Kalibrasi.
7. Sesuai arahan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan serta mengacu pada kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran/hasil yang diharapkan, maka output yang dapat diklaim realisasinya oleh Balai Kalibrasi adalah kalibrasi alat yang menggunakan anggaran Balai Kalibrasi.
8. Mengacu poin nomor 7 (tujuh), capaian indikator kinerja Balai Kalibrasi terkait Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar dengan target sebesar 50%, hanya terealisasi 37,81% atau capaiannya sebesar 75,63% dari target 100% (**target tidak tercapai**).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mengajukan beberapa permohonan yaitu :

- a. Terkait capaian indikator TW 2, mohon dapat dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi Simetris menu *e-performance*.
- b. Anggaran pelaksanaan kalibrasi yang sudah dialokasikan oleh UPT pada tahun 2025 untuk dapat direalokasikan ke dalam DIPA Balai Kalibrasi
- c. Dapat dilakukan pembukaan blokir atas DIPA Balai Kalibrasi Tahun 2025 untuk Rincian Output BIA 001, Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar. Hal ini mengingat Balai Kalibrasi sudah tidak memiliki anggaran untuk kegiatan kalibrasi alat laboratorium di UPT, sehingga tidak dapat memberikan jaminan kebenaran nilai ukur alat pengujian dan validitas hasil uji obat dan makanan.

Demikian kami laporkan, selanjutnya mohon arahan Bapak. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Henry Handoyo

Tembusan:

1. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Inspektur II
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia